

INDONESIA'S GLOBAL ECONOMIC AND PREPARATION IMPACTS FACING CYBER WARFARE IN THE ASIA PACIFIC REGION

Dampak Ekonomi Global Dan Persiapan Indonesia Menghadapi *Cyber Warfare* Di Kawasan Asia Pasifik

Titiek Herawati
Akademi Militer

ABSTRACT

After the end of the cold war in the 1990s, it has resulted in the formation of a new world order focused on freedom. Along with these developments, economic globalization, which became known as the free market, was then seen as a wave of the future to fight for a more just world economic order and ensure prosperity for all humanity in the world. In the end, the increasing economy of the Asia Pacific region, which was followed by global developments with advances in technology and information, has given rise to a trend of increasing military capability both in terms of quantity and quality in fighting over natural resources and other sources.

The existence of globalization has encouraged the development of technology so that various threats of conflict and war between militias with the government and between large countries and small countries are increasingly complex in their facilities. This happens because of the use of information and communication technology, especially cyberspace, which then leads to the threat of cyber warfare.

Keywords: *Cyber War, Globalization, Political Economy*

ABSTRAKSI

Pasca berakhirnya perang dingin di tahun 1990-an telah mengakibatkan terbentuknya tatanan dunia baru yang terfokus kepada kebebasan. Seiring dengan perkembangan tersebut, globalisasi ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah pasar bebas selanjutnya dipandang sebagai gelombang masa depan untuk memperjuangkan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia.

Pada akhirnya, meningkatnya ekonomi negara kawasan Asia Pasifik, yang diikuti dengan perkembangan global dengan kemajuan teknologi dan informasi telah memunculkan trend peningkatan kapabilitas militer baik dilihat dari jumlah maupun mutu untuk memperebutkan sumber daya alam maupun sumber lainnya.

Adanya globalisasi telah mendorong perkembangan teknologi sehingga berbagai ancaman konflik dan perang antar milisi dengan pemerintah maupun antara negara besar dengan negara kecil makin kompleks sarana-prasarananya. Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dunia maya, yang kemudian mengarah pada ancaman perang cyber (*Cyber Warfare*).

Kata Kunci: Cyber War, Globalisasi, Ekonomi Politik

A. Pendahuluan

Pasca berakhirnya perang dingin di tahun 1990-an telah mengakibatkan terbentuknya tatanan dunia baru yang terfokus kepada kebebasan. Seiring dengan perkembangan tersebut, globalisasi ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah pasar bebas selanjutnya dipandang sebagai gelombang masa depan untuk memperjuangkan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia. Sesungguhnya, kepopuleran globalisasi ekonomi tidak dibarengi dengan kesadaran akan adanya bahaya di dalamnya yang pada hakikatnya adalah bentuk perkembangan kapitalisme abad 21. Negara-negara yang kuat dan kaya pasti akan mengendalikan ekonomi dunia, sedangkan negara berkembang dan tertinggal makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing.

Kondisi di atas tidak berlaku bagi negara berkembang yang ada di kawasan Asia pasifik, seperti yang disampaikan oleh dua ahli di bidang geopolitik, Profesor Satoru Mori dari Law Hosei University Jepang dan Yang Yi dari Tiongkok *Institute of International Studies* (2017), bahwa dalam beberapa tahun terakhir memasuki abad 21, perkembangan yang pesat dalam perekonomian dan perdagangan melampaui volume perdagangan trans atlantik di kalangan negara Asia Pasifik telah memperkuat pandangan Asia Pasifik akan menjadi pusat gravitasi perekonomian dunia.

Pada akhirnya, meningkatnya ekonomi negara kawasan Asia Pasifik, yang diikuti dengan perkembangan global dengan kemajuan teknologi dan informasi telah memunculkan trend peningkatan kapabilitas militer baik dilihat dari jumlah maupun mutu untuk memperebutkan sumber daya alam maupun sumber lainnya. Sekaligus telah menggeser sistem pertahanan konvensional yang harus disinergikan dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan informasi. Bahkan, tidak dapat dipungkiri sikap Korea Utara yang semakin sulit diprediksi dan juga perluasan pengaruh militer Tiongkok di laut China Selatan yang semakin memanas membuat kawasan Asia Pasifik kini menjadi wilayah perlombaan senjata dan pembangunan militer yang paling menggeliat hingga telah memancing terjadinya *emerging rivalry dan security dilemma* di kawasan Asia Pasifik.

Di tengah *security dilemma* yang kian tajam, fakta menunjukkan bahwa institusi dan mekanisme yang ada sekarang terbukti belum mampu mengerem perilaku “agresif” negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap terjadinya konflik terbuka sehingga tidak ada yang mampu menjamin kalau perang tidak mungkin terjadi. Tentunya diperlukan kesadaran dari negara Indonesia untuk mempersiapkan munculnya *cyber warfare* di kawasan Asia Pasifik sebagai dampak ekonomi global.

B. Ekonomi Global Dan Tumbuhnya *cyber warfare* Di Kawasan Asia Pasifik

Secara umum globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai proses aktivitas ekonomi secara terbuka dari seluruh negara di dunia, di mana semua negara di dunia menjadi satu kemampuan pasar yang semakin terpadu dengan tidak ada lagi halangan batas wilayah negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan adanya suatu penghilangan semua batasan dan kendala pada arus modal, layanan dan barang. Hal ini menyebabkan batas-batas negara menjadi kabur/ samar.

Dalam <https://ekonomi.kompas.com/> dikatakan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan naik dari 3,8 persen pada 2017 menjadi 3,9 persen pada 2018 dan 2019. Kondisi keuangan global masih cukup akomodatif meskipun diwarnai oleh proses penyesuaian harga aset sejalan dengan proses normalisasi kebijakan moneter negara maju, tensi perdagangan dan ketegangan geopolitik yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagi bangsa Indonesia, BI juga mendukung rekomendasi kebijakan IMF untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan resiliensi, serta mengutamakan prioritas kebijakan jangka menengah dan panjang dengan terus melakukan reformasi di sektor riil, fiskal, dan upaya pendalaman pasar keuangan. BI juga memandang penggunaan kebijakan makprudensial dibutuhkan untuk memantau risiko dan

eksposur aset di sektor keuangan. Selain itu, peningkatan kerja sama multilateral menjadi sangat relevan saat ini mengingat adanya ancaman proteksionisme pada sistem perdagangan global. Indonesia beserta negara-negara G20 sepakat memperkuat kerja sama untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang dan inklusif. Bank Indonesia setuju bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi, memastikan dampak perkembangan teknologi informasi bagi perekonomian, mengatasi ketimpangan yang umumnya dialami kaum wanita dan memitigasi risiko melalui berbagai kebijakan yang ada.

Dewasa ini dimensi ancaman, peperangan di dunia telah mengalami pergeseran dari yang kita ketahui selama ini. Menurut Agus Subagyo (2015), pada era Perang Dingin (1945 – 1990), aktor dan isu global sangat diwarnai oleh “suasana kebatinan” perang ideologi antara Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya yang berideologikan liberalisme kapitalisme) dengan Blok Timur (Uni Soviet dengan ideologi sosialisme komunisme). Kedua blok dunia tersebut saling serang dan saling berebut pengaruh di berbagai belahan dunia sehingga membuat negara-negara di dunia terbelah antara mendukung Blok Barat atau Blok Timur. Penentuan kawan atau lawan di masa Perang Dingin ditentukan oleh aspek ideologi. Ancaman berat yang dihadapi saat itu adalah ideologi.

Pada masa pasca Perang Dingin (1990–2001), konstelasi politik internasional diwarnai oleh isu global berupa hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan hidup. Penentuan kawan atau lawan dalam politik internasional sangat ditentukan oleh apakah suatu negara menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan demokrasi atau tidak. Isu-isu negara berbasis HAM, negara demokratis, dan negara-negara yang anti demokrasi dan anti HAM mengemuka ke permukaan sehingga menimbulkan polemik yang mewarnai tata internasional di dunia.

Pada masa pasca tragedi WTC dan Pentagon, 11 September 2001, sampai dengan sekarang ini, dunia diwarnai oleh perang global melawan terorisme (Global War on Terror, GWOT) yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan didukung oleh negara-negara Barat lainnya. Isu terorisme mulai menyeruak ke permukaan sehingga membelah dunia menjadi dunia teroris dan dunia anti teroris. Amerika Serikat menjadikan terorisme sebagai kampanye global untuk diperangi dan penentuan kawan atau lawan sangat didominasi oleh “apakah anda mendukung teroris atau anda anti teroris”. Terorisme menjadi aktor dan isu global abad ke-21 sehingga menempatkan Al Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al Shabab, Jamaah Islamiyah, dan lain-lain sebagai aktor utama dalam hubungan internasional.

Dinamika politik dunia semakin kompleks dan beragam sehingga mempengaruhi konstelasi politik domestik masing-masing negara. Setiap negara di dunia sekarang ini meningkatkan kewaspadaan akan adanya berbagai ancaman berupa konflik antar negara dan konflik domestik intra negara yang membahayakan keamanan nasional masing-masing negara. Ditambah lagi dengan adanya globalisasi telah mendorong perkembangan teknologi sehingga berbagai ancaman konflik dan perang antar milisi dengan pemerintah maupun antara negara besar dengan negara kecil makin kompleks sarana-prasarananya. Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dunia maya, yang kemudian mengarah pada ancaman perang cyber (Cyber Warfare).

Lalu bagaimanakah dampaknya pada wilayah Asia Pasifik? Pergantian Presiden Amerika Serikat dari Presiden Barrack Obama kepada Presiden Donald Trump telah memunculkan kondisi baru, salah satunya adalah pergeseran 60 persen kekuatan militer Amerika Serikat ke wilayah Asia Pasifik. Menurut Connie Rahakundini Bakrie (2015), pergeseran kekuatan militer Amerika Serikat menjadi awal perang perebutan sumber daya

alam dan jalur perdagangan. Indonesia tidak bisa berdiam diri. Perkembangan ‘kekaisaran militer’ Amerika Serikat, bisa disimak dari pernyataan bekas Menteri Pertahanan, Panetta. Ia menyatakan bahwa 60 persen kekuatan militer Amerika Serikat akan pindah ke kawasan Asia Pasifik mulai 2012 hingga 2020. Mantan Presiden Goerge Bush menyebutnya sebagai strategi perang pencegahan terhadap ‘persatuan negara-negara merah dan orang-orang jahat’. Siapa negara-negara itu? Amerika Serikat telah mengidentifikasi sebagai ‘busur ketidakstabilan’ yang tersebar dari mulai daerah Andes di Colombia terus ke arah Afrika Utara dan kemudian menyapu negeri-negeri seberang Timur Tengah, hingga termasuk Filipina dan Indonesia.

Pencanangan sudah dilakukan sejak Presiden Goerge Walker Bush menetapkannya pada 14 Januari 2004 lalu. Persis 13 tahun lalu. Jadi perang terhadap terorisme, kata Connie, adalah sebagian kecil dari alasan untuk semua strategisasi militer Amerika Serikat di belahan dunia. Yang sebenarnya untuk membangun cincin baru dari pangkalan militer sepanjang khatulistiwa guna memperluas ‘kekaisaran militer’ Amerika Serikat dalam mendominasi dunia. Karena itulah arah kebijakan pertahanan Indonesia telah berubah dari ‘threat based planing’ ke ‘capabilities based planning’. “Kita harus sepakat dulu sebagai bangsa untuk memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi dalam waktu dekat. Dampak tersebarnya 60 persen kekuatan militer AS ke kawasan ini. Itulah kenyataan di depan mata.”

C. Persiapan Indonesia Menghadapi *cyber warfare* Di Kawasan Asia Pasifik

Cyber Warfare ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi internasional yang berkaitan dengan penyerangan yang disengaja kepada jaringan komputer atau jaringan informasi negara lain yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan atau gangguan dalam jaringan tersebut. Serangan *cyber warfare* dapat melumpuhkan website resmi dan juga jaringan informasi, mengacaukan atau melumpuhkan layanan vital suatu Negara. *Cyber Warfare* memiliki arti perang yang dilakukan di dunia maya (*cyber Space*) dengan menggunakan teknologi canggih dan jaringan nircabel/wifi.

Wilayah Asia Pasifik dihuni oleh negara-negara yang mempunyai budaya multikultural, politik yang sangat bervariasi, serta kondisi ekonomi yang beragam. Dampak dari kondisi kawasan Asia Pasifik ini menghantui Indonesia. Ancaman terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumberdaya alamnya sudah di depan mata. Ekonomi yang sedang berkembang dengan baik harus dijaga dari gesekan berbagai kepentingan pihak-pihak untuk menguasainya. *Cyber warfare* telah dimulai di kawasan Asia Pasifik. Tidak banyak waktu bagi Indonesia untuk menyusun strategi dan mengerahkan segala daya upaya untuk menghadapi *cyber warfare* ini. Ketika Indonesia tidak dapat mempersiapkan diri memprotek diri untuk menghadapi *Cyber Warfare* berdampak dikuasainya keamanan nasional indonesia baik di bidang Politik, Kebudayaan, Ekonomi dan Keamanan negara. Arah kebijakan luar negeri harus direposisi.

Dalam <https://inet.detik.com/cyberlife/> disebutkan langkah-langkah yang harus disiapkan oleh negara Indonesia dalam menghadapi *Cyber Warfare* yaitu bahwa urusan besar Kedaulatan *Cyber* bukan sekedar urusan *cyber-attack* saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lingkup kedaulatan *cyber* dapat meliputi: 1) menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan *cyber* warga negara, 2) transaksi online yang aman dan dapat dipercaya, 3) mencegah gangguan atas *public-utility* (listrik, air, gas, lalu-lintas, dst.), 4) menekan dan menanggulangi kejahatan *cyber* (*carding, fraud, penipuan*), 5) pemulihan segera atas gangguan *public utility*, 6) menjaga kewajaran penguasaan ekonomi global, 7) menetapkan kebijakan dan strategi kedaulatan *cyber* nasional, 8) menentukan kebijakan politik luar negeri dunia *cyber*, 9) menentukan kebijakan dan pengaturan perdagangan online global, 10) menentukan kebijakan dan pengaturan perpajakan *e-commerce* global, 11) melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan atas lalu-lintas

cyber, 12) melindungi *critical-infrastructure* pemerintahan, 13) menentukan strategi pembangunan *critical-infrastructure* pemerintahan, 14) menentukan strategi menghadapi *cyber attacks – cyber warfare*, 15) pemulihan segera dampak *cyber attack*, 16) menetapkan panduan koordinasi lintas lembaga/kementerian, 17) mengendalikan penetrasi ideologi, politik, dan sosial-budaya, 18) menentukan kebijakan, strategi, dan ambang toleransi terhadap penetrasi, 19) melaksanakan kebijakan dan strategi ketahanan budaya nasional, 20) menentukan kebijakan dan strategi penataan jaringan broadband nasional dan gerbang *cyber* NKRI, 21) melindungi warga negara (*privacy*, data pribadi) dan anak-anak, 22) menentukan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi dan *privacy* warga Negara, dan 23) menentukan kebijakan dan strategi perlindungan anak nusantara.

Kemajuan teknologi telah membuka peluang dan ancaman baru, mengubah pola dan gaya hidup, dan mengubah pola hubungan antar bangsa. Maka sungguh penting bagi Indonesia untuk menyerukan kepada dunia bahwa semaju apapun perkembangan kemampuan teknologi, eksistensi bernegara harus tetap dihargai dan dihormati. Ke arah dalam negeri, negara perlu melengkapi kemampuan, fungsi kendali, aparat, dan kelembagaan/ organisasi, yang sesuai kemajuan zaman dalam rangka terus menjaga kedaulatan negara.

D. Penutup

Cyber Warfare adalah perang masa kini yang merupakan sisi buruk atau negatif dari perkembangan teknologi. Hal ini terbukti sudah menjadi ancaman yang serius bagi terwujudnya kedamaian dunia. Privasi negara diobok-obok oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab melalui kecanggihan teknologi untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu mengingat negara Indonesia juga berpotensi mendapat ancaman tersebut maka seluruh elemen bangsa harus profesional demi mewujudkan bangsa Indonesia yang kuat, mampu menangkal setiap ancaman dalam bentuk apa p

DAFTAR PUSTAKA

https://www.researchgate.net/publication/322306743_SINERGI_DALAM_MENGHADAPI_ANCAMAN_CYBER_WARFARE [accessed Aug 22 2018].

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/24/133000926/perekonomian-dunia-diyakini-terus-membaik>.

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3131693/perang-cyber-dan-ancaman-kedaulatan-nkri>